

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terlebih dahulu

Andri (2014:5) dengan judul “Rancangan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntan Publik (SAK ETAP) pada usaha kecil dan menengah (UKM) yaitu Konveksi As-shaqi” memiliki masalah dalam pengelolaan keuangan usahanya. Maka dari itu penerapan akuntansi sangat diperlukan yang harus dijalankan oleh konveksi As-shaqi dalam pengelolaan keuangannya jika ingin mengembangkan usahanya. Hasil analisa dari masalah tersebut adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai standar berlaku umum karena tingkat pendidikan belum memadai untuk mengelola keuangan entitas. Pencatatan dan pembukuan yang dilakukan belum lengkap seperti daftar buku piutang, aset, penjualan dan lain lain. Masih bercampurnya kekayaan pribadi dan kekayaan entitas.

Alfi (2013:9) dengan judul “Penerapan pencatatan keuangan dalam usaha kecil menengah (UKM) studi kasus pada UD Keyza Collection di Surabaya” yaitu *Pertama* masalah sumber daya manusia, pada umumnya pemilik atau orang yang bergelut didunia UKM tidak jarang memiliki pengetahuan yang terbatas dalam pengelolaan UKM, sehingga banyak UKM yang tidak berkembang. *Kedua* Masalah pemasaran, merupakan hal yang penting karna pemasaran merupakan jantung dari setiap unit usaha, karena dengan adanya pemasaran tentu pengenalan produk suatu UKM kepada masyarakat umum lebih luas sehingga UKM dapat mengembangkan usahanya agar lebih baik lagi. *Ketiga*, masalah akuntabilitas yang dimana menjadi tolak ukur bagi UKM berkembang atau tidaknya unit usaha tersebut.

Rahmad (2015:6) dengan judul “Analisa perancangan dan penerapan akuntansi pada UKM Argalantina” menemukan masalah utama dalam pengembangan UKM yaitu mengenai pengelolaan keuangan dalam usahanya tersebut, karena pengelolaan yang baik memerlukan keterampilan akuntansi yang baik pula oleh pelaku bisnis UKM dan banyak pelaku bisnis UKM beranggapan bahwa pembukuan dalam laporan keuangan usahanya adalah suatu hal yang sulit dan pada umumnya pemilik kurang membutuhkan informasi akuntansi karena keterlibatan pribadinya langsung dan langsung dalam kegiatan usaha tersebut. Hasil dari analisa tersebut adalah sebelumnya UKM perkebunan Argalantina belum pernah membuat laporan keuangan pada usaha yang dijalankannya tersebut. Penulis membantu UKM perkebunan Argalantina untuk membuat dan menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku umum, sehingga memperoleh pinjaman dari bank untuk mengembangkan UKM perkebunan Argalantina tersebut.

Anggareni (2012:2) dengan berjudul “Penerapan sistem akuntansi sederhana pada UKM cireng cageur group Bogor” menemukan masalah mendasar usaha kecil yang paling menonjol menyangkut menyediakan pembiayaan usaha alias modal usaha. Kebutuhan modal sangat terasa pada saat seseorang ingin memulai usaha baru. Alhasil, biasanya bila motivasinya kuat, seseorang akan tetap memulai usaha kecil tetapi dengan modal seadanya. Pada usaha yang sudah berjalan, modal tetap menjadi kendala lanjutan untuk berkembang. Masalah yang menghadang usaha kecil menyangkut kemampuan akses pembiayaan, akses pasar dan pemasaran, tata kelola manajemen usaha kecil serta akses informasi. Kesulitan usaha kecil mengakses sumber-sumber modal karena keterbatasan informasi dan kemampuan menembus sumber modal tersebut, padahal pilihan sumber modal sangat banyak dan beragam.

Rangga (2012:7) dengan berjudul “Makna Penerapan pencatatan keuangan bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM) studi kasus pada Depot Pakdjo Surabaya”, menemukan masalah tidak adanya Sumber Daya Manusia yang menangani secara khusus mengenai pencatatan keuangan yang baik, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pencatatan keuangan menjadi faktor penting penyebab tidak terselenggaranya informasi akuntansi yang baik. Hasil dari analisa tersebut padapenerapan pencatatan keuangan bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM) studi kasus pada Depot Pakdjo Surabaya adalah, bahwa pencatatan yang dilakukan pada depot pak Djo hanya berupa pencatatan atas pembelian dan penjualan aktivitas sehari-hari, pemahaman tentang penerapan laporan sebatas apa yang ditulis dibuku dan dipahami sendiri. Pencatatan laporan dilakukan oleh pegawai sendiri tetapi dalam pelaksanaan pencatatan tetap diawasi dan dipantau oleh pemilik depot berdasarkan dari nota lalu ditulis dibuku

Elisabeth (2015:11) yang berjudul “Penyusunan Laporan Keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntan Publik”, menemukan masalah yaitu Setiap unit usaha pasti membutuhkan pendanaan dari bank sebagai bentuk permodalan untuk mengembangkan usahanya. Demikian yang terjadi UKM ingin mengikuti lelang pengadaan barang yang diadakan oleh pihak rekanan, tetapi pasti pihak rekanan meminta laporan keuangan UKM sebagai syarat kelengkapan administratif, berarti hal itu menuntut para pemilik UKM untuk membuat laporan keuangan untuk menyediakan laporan untuk usahanya tersebut berdasarkan standar yang berlaku umum. Hasil dari analisa tersebut adalah, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam pembuatan laporan keuangan, kurangnya disiplin, dan kurangnya pemahaman akan pentingnya pembuatan laporan keuangan padahal dengan dilakukannya pembuatan laporan keuangan diharapkan akan mendapat izin mengikuti lelang pengadaan barang dan tidak ketersediaan

waktu lebih untuk membuat laporan karena hanya berfokus pada kegiatan operasioan usaha

Anantawikrama (2014:3) yang berjudul “Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan berbasis SAK ETAP pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”, kurangnya pengetahuan pemilik usaha akan pembuatan laporan keuangan karena latar belakang pendidikan. Jadi latar belakang pendidikan sangat mempengaruhi dalam pencatatan laporan keuangan. Kurangnya perhatian dan pengawasan dari berbagai pihak yang berkepentingan, terutama dari pemerintah sebagai regulator. Padahal kepedulian pengembangan UMKM menjadi kepentingan bagi semua pihak. Hasil dari analisa tersebut adalah, keinginan dan niat yang dilakukan oleh pemilik UMKM untuk mengembangkan usahanya untuk mempermudah dalam penggajian telah memotivasi berbagai pihak untuk selalu lebih baik lagi dalam pencatatan laporan keuangan. Namun pencatatan masih sangat sederhana dan manual. Jadi, untuk terciptanya pengelolaan sektor UKM yang baik dan mampu bersaing, maka perlu dilakukan implementasi terhadap penerapan laporan keuangan dan adanya dukungan dari berbagai pihak agar lebih baik lagi dan tentunya diperlukan pengawasan dari berbagai pihak termasuk stakeholders dalam pencatatan yang diterapkan.

Arma (2014:8) yang berjudul “Analisis pemahaman terhadap penerapan SAK ETAP pada Bank Perkreditan Rakyat di kota Pasir Pengairan”, menemukan masalah yaitu Pemahaman yang kurang oleh Badan Perkreditan Rakyat dalam pembuatan laporannya, karna perusahaan yang dianjurkan memakai SAK ETAP adalah perusahaan yang tidak mempunyai akuntabilitas publik, sedangkan untuk perusahaan *go public* tidak diperkenankan memakai SAK ETAP. Hasil dari analisa tersebut adalah, Badan Perkreditan Rakyat tidak semua memiliki pemahaman yang cukup terhadap penerapan laporan keuangan berbasis SAK ETAP, namun karna penelitian menggunakan nilai rata-rata maka

hasilnya Badan Perkreditan Rakyat yang berada di kota Pasir Pengairan telah memiliki pemahaman yang cukup tentang SAK ETAP.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Akuntansi Keuangan

Merliyana (2012:3) dalam bukunya Akuntansi Keuangan bahwa:

“Akuntansi adalah suatu system informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan”.

Menurut Kartikahadi (2016:5) bahwa akuntansi secara khusus diartikan:

1. Pengambil keputusan ekonomi, khususnya tentang investasi atau pinjaman.
2. Pemahaman tentang posisi atau keadaan keuangan suatu unit usaha, susunan aset yaitu sumber ekonomi yang dimiliki, sumber pembelanjaan yaitu komponen liabilitas dan ekuitas yang membelanjai aset tersebut.
3. Pemahaman tentang kinerja dan arus kas.

Martani (2011:7), alasan dibuatnya standar akuntansi adalah:

1. Untuk keseragaman laporan keuangan.
2. Memudahkan penyusunan laporan keuangan karena ada pedoman baku sehingga meminimalkan bias dari penyusunan
3. Memudahkan auditor.
4. Memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda.
5. Pengguna laporan keuangan banyak pihak sehingga penyusun tidak dapat menjelaskan kepada masing masing pengguna.
6. Regulasi mengharuskan perusahaan dengan kriteria tertentu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar : UU PT, UU Pasar Modal.

Standar akuntansi keuangan (SAK) merupakan pedoman bagi siapa saja dalam menyusun laporan keuangan yang akan diterima secara umum. Standar akuntansi mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi pada saat tertentu. Standar akuntansi menjelaskan transaksi yang harus dicatat, bagaimana mencatatnya dan bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan yang akan disajikan.

Mekanisme Standar Akuntansi Keuangan maka penyusunannya harus sedemikian rupa sehingga memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu standar akuntansi hanya disusun oleh pihak yang berwenang. Di Indonesia kewenangan tersebut diberikan kepada Komite Standar Akuntansi Keuangan yang berada dibawah naungan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)

Pada bulan April 2010, Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) secara resmi mengakui 3 pilar standar akuntansi keuangan (IAI, 2010) Tiga pilar tersebut adalah:

1. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)
2. PSAK-ETAP (Entitas Tanpa Akuntan Publik)
3. PSAK Syariah

Instansi Pemerintah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), PP 24 tahun 2005 => PP 71 tahun 2010 berbasis akrual.

2.2.2 Siklus Akuntansi

Sinaga (2012:75) mendefinisikan bahwa:

“Siklus akuntansi sebagai sistem yang bertujuan menghasilkan informasi keuangan yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan, mempunyai disiplin tersendiri yang harus dipahami dengan baik untuk dapat memproses data menjadi informasi akuntansi secara efektif dan efisien”.

Sylvia (2016:82) mendefinisikan bahwa:

“Siklus akuntansi ialah suatu sistem informasi keuangan sebagaimana kelaziman suatu sistem, mempunyai tujuan, unsur-unsur yang terkelola menurut tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. Unsur-unsur tersebut antara lain meliputi konsep, prinsip, standar peristilahan teknis, dokumen, media, prosedur, dan proses yang terkoordinasi dan tertata secara baik”.

Kartikahdi (2012:92) mendefinisikan bahwa:

Siklus akuntansi adalah suatu lingkaran proses akuntansi untuk membukukan transaksi dan kejadian selama suatu periode akuntansi tertentu sampai tersusun laporan keuangan. Berikut adalah penjelasan dari komponen siklus:

1. Bukti pembukuan, Agar laporan keuangan dapat memenuhi persyaratan keandalan, semua transaksi dan kejadian yang dibukukan dalam proses akuntansi haruslah didukung oleh bukti bukti yang memenuhi keabsahan sesuai peraturan internal entitas maupun peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Ayat Jurnal, adalah tahap pertama dari suatu proses akuntansi yaitu membukukan ayat jurnal suatu transaksi atau kejadian dalam wadah pembukuan yang paling dasar, jurnal atau buku harian.
3. Posting, adalah tahap kedua dalam proses akuntansi yang memindahkan data pembukuan dari jurnal ke masing masing akun

buku besar dan untuk akun tertentu yang perlu di rinci, juga dilakukan posting ke akun tambahan dalam buku tambahan yang bersangkutan.

1. Penyusunan Neraca Percobaan, adalah suatu daftar untuk menguji keseimbangan debit dan kredit dari semua pembukuan transaksi dan kejadian sampai terhitung saldo akun buku besar.
2. Ayat jurnal penyesuaian, perlu dilakukan agar data akuntansi dapat dimutakhirkan.
 - 1) Beban yang diakru.
 - 2) Pendapatan yang diakru.
 - 3) Biaya dibayar dimuka.
 - 4) Pendapatan diterima dimuka.
 - 5) Penyisihan piutang tak tertagih.
 - 6) Penyusutan aset tetap.
 - 7) Amortisasi aset tak berwujud.
3. Lembar Kerja
 - 1) Neraca saldo.
 - 2) Penyesuaian.
 - 3) Neraca saldo setelah penyesuaian.
 - 4) Rugi laba.
 - 5) Neraca

2.3 Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian laporan keuangan

Agoes, dalam buku yang berjudul “Analisis Laporan Keuangan” (2012:44)

“Laporan Keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan number daya ekonomi (aset) dan kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan standar yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain standar akuntansi yang berlaku umum”.

Kartikahadi, dalam buku yang berjudul “Analisa Akuntansi Keuangan” (2012:12)

“Laporan keuangan adalah media utama bagi suatu entitas untuk mengkomunikasikan informasi keuangan oleh manajemen kepada para pemangku kepentingan. Dikarenakan laporan keuangan memiliki peranan penting dalam dunia bisnis, maka penyajiannya harus sesuai standar yang berlaku umum. Laporan keuangan yang disajikan harus memenuhi karakteristik kualitatif tertentu sehingga dapat memberikan informasi yang baik, tepat dan berkualitas bagi para pemakainya”.

Munawir (2010:5) Mengemukakan pengertian laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan laporan laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas.”

Menurut PSAK No 1 (2015:1) Mengemukakan pengertian laporan keuangan sebagai berikut :

“Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasikan dalam nilai moneter”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan tentang posisi keuangan suatu entitas yang berasal dari proses akuntansi lalu dilaporkan kepada manajemen yang kemudian digunakan untuk pihak pihak yang membutuhkan dalam pengambilan keputusan.

2.3.2 Tujuan laporan keuangan

Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:3) tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan suatu keputusan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Selain itu laporan keuangan juga bertujuan untuk:

- 1) Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya tentang aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.
- 2) Memberikan informasi keuangan kepada para pemakai laporan keuangan dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
- 3) Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan aktiva neto suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan suatu usaha dalam rangka memperoleh laba.
- 4) Memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi.

- 5) Memberikan informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan.

2.4 SAK ETAP

2.4.1 Ruang Lingkup SAKETAP

Standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Ruang lingkup standar ini juga menjelaskan bahwa Entitas dikatakan memiliki akuntabilitas publik signifikan jika: proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. (Majalah Akuntan Indonesia; Edisi No.19/Tahun III/Agustus 2010)

2.4.2 Neraca

Informasi yang disajikan dalam neraca adalah:

1. Kas dan setara kas.
2. Piutang usaha dan piutang lainnya.
3. Persediaan.
4. Property investasi.
5. Aset tetap.
6. Aset tidak berwujud.
7. Utang usaha dan utang lainnya.
8. Aset dan kewajiban pajak.
9. Kewajiban diestimasi.
10. Ekuitas.

2.4.3 Laporan Laba Rugi

Laporan laba-rugi untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangannya selama periode tersebut. Mengatur informasi yang disajikan dalam laporan laba-rugi dan bagaimana penyelesaiannya. Laporan laba-rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode.

Informasi yang disajikan dalam laporan laba-rugi:

1. Pendapatan.
2. Beban keuangan.
3. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan ekuitas.
4. Beban pajak.
5. Laba atau rugi netto.

2.4.3 Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba-Rugi dan Saldo Laba

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (bergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan deviden dan distribusi lain ke, pemilik ekuitas selama periode tersebut.

Informasi yang disajikan dalam perubahan ekuitas:

1. Laba atau rugi untuk periode.
2. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas.
3. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui.

4. Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari:
 - a. Laba atau rugi.
 - b. Pendapatan dan beban yang diakui langsung oleh ekuitas
 - c. Jumlah investasi, deviden dan distribusi lainnya kepemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasury, dan deviden serta distribusi lainnya kepemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.

2.4.5 Laporan Laba Rugi dan saldo Laba

Laporan laba-rugi dan Saldo Laba menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan.

Informasi yang disajikan dalam laporan laba-rugi dan saldo laba

- a. Saldo laba pada awal periode pelaporan.
- b. Dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau diutang selama periode.
- c. Penyajian kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan periode lalu.
- d. Penyajian kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan akuntansi.
- e. Saldo laba pada akhir periode pelaporan.

2.4.6 Laporan Arus Kas

Setara Kas

Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan.

Informasi yang disajikan dalam arus kas:

Aktivitas operasi

- a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa.
- b. Penerimaan kas dari royalty, Fee, komisi dan pendapatan lainnya.
- c. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa.
- d. Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan.
- e. Pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi.
- f. Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali.

Aktivitas Investasi

- a. Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset tetap yang dibangun sendiri), aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya.
- b. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya.
- c. Pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam joint venture (selain pembayaran untuk efek yang diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas atau dimiliki atau diperdagangkan).
- d. Penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain dan bunga dari joint venture (selain penerima dari efek yang diklasifikasikan sebagai setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan).
- e. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.
- f. Penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.

Aktivitas Pendanaan

- a. Penerimaan kas dari penerbitan saham atau eek ekuitas lain.
- b. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham entitas.
- c. Penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya.
- d. Pelunasan pinjaman.
- e. Pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.

2.4.7 Catatan Atas Laporan Keuangan

Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

- a. Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
- b. Kebijakan akuntansi lain yang digunakan yang relevan untuk memahami laporan keuangan.

Informasi Tentang Pertimbangan

Entitas harus mengungkapkan pertimbangan secara terpisah dari hal-hal yang melibatkan estimasi dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan atau catatan atas laporan keuangan lainnya yang digunakan manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yan diakui dalam laporan keuangan.

Informasi Tentang Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi

Estimasi harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan entang informasi mengenai asumsi pokok tentang masa depan dan sumber-sumber pokok lain untuk mengestimasi keidakpastian pada akhir periode pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang menyebabkan adanya suatu penyesuaian yang material terhadap jumlah

tercatat aset dan kewajiban dalam laporan keuangan tahun berikutnya. Terkait aset dan kewajiban tersebut, catatan atas laporan keuangan harus memasukan rincian tentang:

- a. Sifat
- b. Jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan

(Sumber: Standar Akuntansi Keuangan Entitas anpa Akuntabilitas Publik (2017:9)

2.5 Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

2.5.1 Pengertian Usaha Kecil dan Usaha Menengah

Primiana mendefinisikan usaha kecil adalah sebagai berikut(Primiana 2010:11):

1. Pengembangan tempat kegiatan ekonomi utama (*core business*) yang menjadi motor penggerak pembangunan, yaitu agribisnis, industri manufaktur, sumber daya manusia (SDM), dan bisnis kelautan.
2. Pengembangan kawasan andalan, untuk dapat mempercepat pemulihan perekonomian melalui pendekatan wilayah atau daerah, yaitu dengan pemilihan wilayah atau daerah untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan sektor-sektor dan potensi.
3. Peningkatan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.

Financial Accounting Standard Board (FASB) dalam Ahmed Riahi Balkaoui (2010:50), mendefinisikan perusahaan kecil sebagai berikut:

“Sebuah perusahaan kecil yang operasinya relatif kecil, biasanya dengan pendapatan total kurang dari \$5 juta”Perusahaan itu umumnya:

- a. Dikelola oleh pemilik sendiri.
- b. memiliki beberapa pemilik lain, jika ada.
- c. Semua pemilik secara aktif terlibat dalam menjalankan urusan-urusan perusahaan kecuali mungkin anggota keluarga tertentu.
- d. Jarang terjadi pemindahan hak kepemilikan, dan.
- e. Memiliki struktur modal yang sederhana.

Kwartono (2011:76) mendefinisikan usaha kecil adalah sebagai berikut:

“Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- .(Adi,2007:12).

Zulkarnain mendefinisikan pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai (Zulkarnain, 2010:125):

1. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar rupiah.
3. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar.
4. Berbentuk badan usaha yang dimiliki perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.

Berdasarkan defini diatas dapat diambil kesimpulan, unit usaha kecil adalah sebuah unit usaha yang didirikan perorangan yang operasional kegiatannya berupa dalam bidang jasa maupun dagang yang turut serta membantu pemerintah dalam pembangunan perekonomian masyarakat dan

yang harus diawasi dan diberikan perhatian lebih dari seluruh pihak yang berkepentingan agar unit usaha dapat berkembang.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Menengah Kecil dan Menengah menyebutkan: "Usaha Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

Pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan kriteria yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai usaha mikro, yaitu:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah memberikan pengertian pemberdayaan sebagai upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pasal 1 angka (10) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan definisi dari upaya pengembangan, yaitu:

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan

bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.

Ketentuan untuk dikatakan sebagai usaha kecil harus sesuai dengan beberapa ketentuan yang diatur oleh undang-undang, di antaranya ketentuan mengenai besarnya modal dan pendapatan. Ditinjau dari sisi modal dan pendapatan, Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengatur harus memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Hasil analisa diatas dapat diambil kesimpulan, Usaha menengah adalah suatu kegiatan unit usaha yang didirikan perseorangan atau kelompok yang kegiatannya berada di dalam industri jasa maupun dagang yang turut serta membantu pemerintah dan diatur oleh Undang Undang.

2.5.2 Peran dan Fungsi UKM

Pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen yaitu Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta Departemen Koperasi dan UKM. Namun, usaha pengembangan yang telah dilaksanakan masih belum memuaskan hasilnya karena pada kenyataannya kemajuan UKM sangat kecil dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai usaha besar. Pelaksanaan kebijaksanaan UKM oleh pemerintah selama Orde Baru, sedikit saja yang dilaksanakan, lebih banyak hanya merupakan

semboyan saja sehingga hasilnya sangat tidak memuaskan. (Sumber :Suryo B.Sulisto,2015:7)

Auliyah (2012) fungsi dan peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sangat besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Fungsi dan peran itu meliputi:

- a. Penyediaan barang dan jasa.
- b. Penyerapan tenaga kerja.
- c. Pemerataan pendapatan.
- d. Sebagai nilai tambah bagi produk daerah.
- e. Peningkatan taraf hidup masyarakat.

Melihat fungsi dan peranan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang sangat besar bagi pertumbuhan dan pembangunan perekonomian, maka perhatian dari seluruh pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah sebagai regulator sangat diharapkan. Pemerataan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di tiap daerah yang memerlukan perhatian lebih harus dimaksimalkan, agar penyerapan tenaga kerja lebih maksimal. Sehingga pemerataan pendapatan dan kemakmuran masyarakat dapat tercapai.

2.5.3 Karakteristik dan Ciri Unit Kecil Menengah (UKM)

Ciri-ciri usaha menengah

1. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.

3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll.
4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dan lain-lain.
5. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
6. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Ciri-ciri usaha kecil

1. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.
2. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.
3. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha.
4. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
5. Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha.
6. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
7. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.

Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
3. Milik Warga Negara Indonesia.
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.
5. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

2.5.4 Peluang dan Tantangan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Indonesia menghadapi peluang sekaligus tantangan ekonomi, UKM memiliki kontribusi yang besar dalam membantu pemerintah dalam hal pembangunan perekonomian masyarakat. Di Indonesia, UKM memiliki peran strategis bagi perekonomian Nasional dengan menyumbang 53,3% dari total PDB (Pendapatan Domestik Bruto). Jumlah UKM di Indonesia mencapai sekitar 56,2 juta unit dan mampu menyerap 97,2 % tenaga kerja dari total angkatan tenaga kerja yang ada. (Sumber: zahiraaccounting.com).

Banyak tantangan yang harus dihadapi Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam menghadapi tantangan global, yaitu:

1. Pola pikir masyarakat Indonesia yang masih tradisional yang masih menggunakan produk luar negeri. Seharusnya para pelaku usaha memiliki daya saing sebagai industri yang kreatif agar mampu

memberikan inovasi dan terobosan untuk meningkatkan kualitas produk.

2. Lemahnya infrastruktur untuk pendistribusian barang-barang atau bahan baku yang terdapat dipelosok yang menyebabkan melambungnya harga. Peranan kebijakan pemerintah sangat diharapkan untuk mempermudah mengakses jalur-jalur distribusi yang berada dipelosok.
3. Keterbatasan kepemilikan modal dalam UKM, karena masih adanya keraguan oleh pihak bank dalam memberikan pinjaman kepada UKM. Pemerintah memberikan pelatihan kepada setiap unit usaha bagaimana cara mengelola usaha kecil menengah dengan baik agar pihak bank memiliki beberapa pertimbangan dalam memberikan pinjaman.
4. Semakin berkembangnya teknologi dirasa kurang dimanfaatkan oleh pelaku unit usaha karena keterbatasan pengetahuan. Sehingga menghambat untuk melakukan promosi terhadap barang-barang yang dihasilkan untuk memperluas target pemasarannya.
5. Kurangnya kesadaran terhadap investasi UKM pada pengembangan dan penelitian produk karena lebih berfokus pada target dan kegiatan operasionalnya.
6. Banyak UKM yang belum memiliki perencanaan bisnis yang matang, karna keterbatasan biaya untuk menyewa jasa konsultasi dan informasi.

Berikut peluang untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dapat diraih dalam persaingan global, yaitu:

1. Peningkatan investasi yang terus terjadi.
2. Indonesia memiliki sumber daya yang besar, sehingga bahan baku mudah didapatkan.
3. Potensi sumber daya manusia yang memiliki khususnya usia muda yang produktif sehingga menopang pasar domestic yang besar.
4. Jumlah UKM di Indonesia makin bertambah.

5. Kebutuhan masyarakat yang terus bertambah setiap harinya.
6. Adanya peranan dan kebijakan pemerintah untuk membantu kelangsungan usaha kecil menengah dalam mengembangkan usahanya.